



SUMBER BERITA

SENIN, 23 APRIL 2018

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Bendungan Sengkuang Terbengkalai

TANJUNG AGUNG PALIK, BE- Ketua DPRD Bengkulu Utara (BU), Aliantor Harahap SE mengaku kecewa atas tidak selesainya proyek Bendungan Sengkuang di Kecamatan Tanjung Agung Palik (TAP).

Ia meminta agar Bupati BU, Ir Mian dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) BU, Heru Susanto ST.

"Pekerjaan itu bukan nilainya kecil, tapi pagu anggarannya Rp 4,9 Miliar. Bayangkan bagaimana kerugian yang terjadi, baik dari sisi pemerintah daerah maupun masyarakat," ujarnya. Aliantor menceritakan, ketika

pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terjadi perdebatan yang sangat alot terkait pembangunan irigasi Sengkuang tersebut. Bahkan, hingga terjadi 5 kali penundaan pembahasan lantaran proyek itu tidak dimasukkan.

"Perjuangan yang sangat alot untuk dapat menganggarkan proyek itu. Namun setelah dianggarkan, pekerjaannya tidak selesai," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD diharapkan dapat menggali penyebab tidak selesainya 4 Proyek tersebut. Mulai dari bendungan di Desa Sengkuang, peningkatan jalan

hotmix di Desa Kota Bani dan Air Pandan serta pembangunan Gapura perbatasan di Desa Rena Jaya.

"Apa masalahnya. Nanti Pansus yang akan mengecek betul. Apakah kendala material, anggaran yang tidak sesuai, rekanan yang tidak bagus atau kepala SKPD-nya yang tidak mampu mengkoordinir semuanya," terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD BU, Mohtadin SIP juga sangat menyayangkannya tidak selesainya 4 proyek itu. Ia menyampaikan, Komisi III selaku bidang pengawasan sudah berulang kali memanggil pihak PUPR BU dalam hearing yang dilakukan komisi. Namun, ketika itu pihak DPUPR menegaskan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.

"Dari 4 proyek itu, total anggarannya mencapai Rp 23 Miliar. Bayangkan berapa kerugian masyarakat yang seharusnya dapat menikmati pembangunan tersebut," tuturnya.

Ia juga menyebutkan, dari pelaksanaan hearing yang dilaksanakan Komisi III pada tahun 2017 dengan memanggil pihak PUPR BU. Kepala Dinas PUPR, Heru Susanto ST sangat sulit untuk hadir.

"Dari sekian banyak hearing yang kita lakukan bersama pihak PUPR, hanya beberapa kali saja Kepala Dinas-nya hadir

langsung. Selebihnya, hanya diwakilkan saja. Dengan alasan sedang DL (Dinas Luas, red)," pungkasnya.

Adapun 4 proyek DPUPR BU yang bermasalah di tahun 2017, yakni bendungan di Desa Sengkuang Kecamatan TAP pagu anggaran Rp 4,9 Miliar. Selanjutnya, peningkatan jalan hotmix Kota Bani-Suka Baru pagu anggaran Rp 11 Miliar, peningkatan jalan hotmix di Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau pagu anggaran Rp 6,3 Miliar dan gapura tapal batas (Tabat) di Bukit Resam Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya dengan pagu anggaran Rp 746 juta. (816)